



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III
TAHUN 2025

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MAMUJU**



2025



Sosial Media Kami

@bppmhkp_mamuju



Kontak Kami

(0426) 22434



Alamat Kami

**Jalan Martadinata Simpang
Empat Arteri Simboro
Mamuju**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja TW III Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj TW III Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait Sasaran strategi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj TW III Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Tahun 2025 adalah Rencana Kegiatan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju (Renstra Stasiun KIPM Mamuju) Tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 beserta Realisasinya.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju di masa mendatang.



Mamuju, 8 Oktober 2025
Kepala SKIPM Mamuju,


Darwis, S.Pi., M.P



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada Tahun 2025 adalah sebesar 106.72%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Mamuju yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju telah ditetapkan target indikator kinerja sebanyak 15 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah Terealisasi di TW III dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru Terealisasi pada Triwulan berikutnya, bahkan ada yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 70 terealisasi 100 %.
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi) 1 lokasi tidak masuk dalam target triwulan III
4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Mamuju dengan target 99 (%) dan terealisasi sebesar 100 %. Dimana tidak adanya permohonan sertifikasi lalulintas kegiatan ekspor yang dilakukan selama triwulan III tahun 2025 ini.
5. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%) 75 tidak masuk dalam target triwulan III
6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 75 tidak masuk dalam target triwulan III



7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) dengan target 85 tidak masuk dalam target triwulan III
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 71.5 tidak masuk dalam target triwulan III
9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 100 tidak masuk dalam target triwulan III
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) dengan target 75 dan nilai realisasi triwulan III sebesar 82.4 tidak masuk dalam target triwulan III
11. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 86 tidak masuk dalam target triwulan III
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 85 % dan terealisasi sebesar 100 % dan melebihi target sebesar 117 %
13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) 76 dan terealisasi sebesar 100 % dan melebihi target sebesar 120 %
14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%) dengan target 50%. tidak masuk dalam target triwulan III
15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai) 88 dan terealisasi sebesar 93.06 %.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BABI PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 SDM Stasiun KIPM Mamuju	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Kegiatan 2021–2025	11
2.2 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran	14
2.3 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	15
2.4 Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisa dan Evaluasi	21
BAB IV PENUTUP	
Lampiran - Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.Sasaran Kegiatan SKIPM Mamuju	13
Tabel 2.Target Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 3.Alokasi Pagu TA 2025	18
Tabel 4.Sasaran Kegiatan 1 (SK1).	20
Tabel 5.Sasaran Kegiatan 2 (SK2).	24
Tabel 6.Sasaran Kegiatan 3 (SK3).	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar1.Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju	7



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Asas penyelenggaraan good governance adalah Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Mamuju dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Mamuju. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah peraturan menpan RB republic Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan republic Indonesia nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi lingkup KKP pedoman evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian kelautan dan perikanan inspektorat jenderal KKP tahun 2022

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan ;
- b. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan lembaga inspeksi;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu PMMT/HACCP;



- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional laboratorium dan lembaga inspeksi ;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan

Sambil menunggu PERMEN yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT, untuk Laporan Kinerja TW III Tahun 2025 ini masih berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Mamuju dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan unsur pelaksana Pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan di daerah dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Urusan Umum;
- b. Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer;
- c. Ketua Tim Kerja Mutu Pasca Panen;
- d. Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Tim Kerja mutu produksi primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Selain itu, juga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan



- pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta surveilen pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil lingkup Unit Pelaksana Teknis;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT; dan
 - d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Produksi Primer di UPT.

Tim Kerja Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Mutu Pascapanen di UPT.

Tim Kerja Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

kegiatan penerapan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis. Selain itu juga menyelenggarakan Fungsi ;

- pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup UPT di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pengelolaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Mamuju selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut :





1.3 Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Mamuju

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju dibantu oleh 1 (satu) Kepala Urusan Umum 3 (tiga) tim kerja yaitu Tim kerja mutu primer, Tim Kerja Mutu Pasca Panen dan Tim Kerja Manajemen Mutu serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Verifikator Keuangan, Penata Keuangan APBN, APK APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju saat ini berjumlah 11 orang pegawai dengan dibantu 1 orang PPPK dan 4 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) serta 5 orang pegawai PJLP.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja TW III Tahun 2025 ini menyampaikan tingkat pencapaian kinerja Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi kinerja TW III Tahun 2025.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja TW III Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek Kegiatan serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian



kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan.

BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kegiatan 2025–2029

Perencanaan Kegiatan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari system kinerja instansi pemerintah.

Stasiun KIPM Mamuju telah menyusun perencanaan Kegiatannya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025 -2029 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Selaras dengan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan memiliki fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya untuk kelangsungan usaha perikanan serta sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan.

Kontribusi Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati ikan, kelautan dan perikanan, dan meningkatkan produktivitas serta dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan pola konsumsi global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh UPT BPPMHKP.



Berdasarkan perubahan global dan agar mampu menjawab tantangan dan mengemban fungsi tersebut, maka Stasiun KIPM Mamuju yang diposisikan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan sebagai subsistem dari sistem pencegahan/perindungan (proteksi) kesehatan ikan dan sumber daya perairan dari ancaman penyakit ikan, maka harus memiliki visi yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari serta sebagai penggerak dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi dibidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BKIPM sebagai berikut :

Visi : “Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing”. Penjelasan **Hasil perikanan**, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; **Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman**, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (aman konsumsi); **Terpercaya** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan



pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (*HC* dan *HACCP*) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Adapun Tujuan Kegiatan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pengawasan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah menjamin mutu hasil perikanan nasional”

2.1 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran

Sasaran Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Mamuju

SK	SASARAN KEGIATAN
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Pengawasan Mutu hasil kelautan perikanan
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten sesuai standar
SK3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta manajemen pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.



2. Peningkatan dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan penerapan SNI dalam operasional laboratorium uji dan lembaga inspeksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional.
4. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu-hilir.
5. Pengembangan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan kebijakan diatas yang merupakan landasan dalam penyusunan rencana kerja atau program. Program Stasiun KIPM Mamuju tidak terlepas dari program BKIPM yaitu program Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya.

Kegiatan yang telah disusun tersebut merupakan aktualisasi operasional dari suatu rencana Kegiatan yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi dan berlaku untuk periode satu tahun. Stasiun KIPM Mamuju pada tahun 2025 mengelompokkan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ikan dengan kegiatan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Manajemen Mutu
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Salah satu dari 9 (sembilan) program nasional Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Kinerja. Penerapan penguatan kinerja pada Kementerian



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah berupa peningkatan kualitas Laporan Kinerja dan kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja pada Kementerian yang mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan Januari 2025 Kepala Stasiun KIPM Mamuju sebagai pihak pertama dan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 (Lampiran 2). Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



		3	Lokasi pengawasan mutu hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Lokasi)	1
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju	99
SK 2.	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	75
SK 3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Mamuju	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	71.5
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	87
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	70
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)Mamuju (%)	88

2.2 Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Mamuju pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.484.031.000. Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel dibawah ini.



Tabel 3. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Mamuju TA.2025

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	130.069.000	130.069.000
2	Manajemen Mutu	145.000.000	145.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	3.208.962.000	3.208.962.000



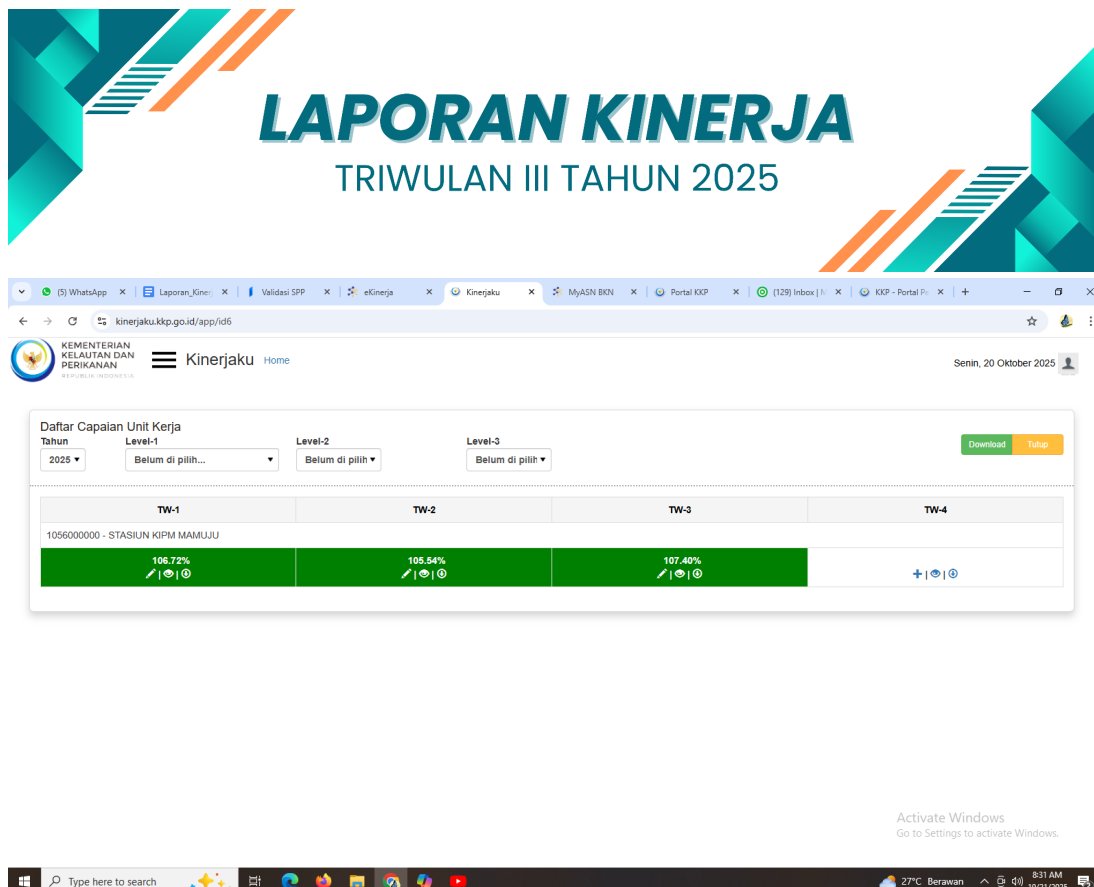
BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju sebesar 105,54% (kategori Baik). Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program Badan pengendalian dan Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun KIPM Mamuju pada triwulan III Tahun 2025 untuk setiap Sasaran Kegiatan dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap Sasaran Kegiatan. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Ringkasan capaian indikator kinerja Triwulan III Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 disajikan pada Tabel Berikut:



3.2 Analisis dan Evaluasi

SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Dari Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 4. SK1. Target dan realisasi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW III TAHUN 2025	Realisasi TW III 2025
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	100



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	70	100
		3	Persentase pengawasan mutu hasil Perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)	-	-
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99	100



IK.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Analisis

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

dalam sistem OSS maupun secara manual.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

2. Capaian

Indikator Kinerja Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan diukur dengan menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar. Pada Triwulan ke III Tahun 2025, capaian Sertifikat yang sudah Terealisasi masih dengan dengan target persentase capaian 100 %. Realisasi penerbitan sertifikat Produksi Primer seperti disajikan dalam tabel 5 di bawah ini :

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
Realisasi	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target Restra
70	70	100	100	70	70	100

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

- a. Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pembudidaya dan Nelayan Penangkap Ikan terkait pelaksanaan sertifikasi produksi primer serta pembuat pakan dan obat ikan bahwa dengan tersertifikasinya unit usaha yang mereka miliki akan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dalam proses usahanya.

- b. Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain Tidak terdapat permohonan sertifikasi produksi primer baik melalui OSS maupun permohonan secara manual.
- c. Terbatasnya jumlah pelaku usaha perikanan di Wilayah Kerja Stasiun KIPM mamuju dan kurang minatnya pelaku usaha untuk disertifikasi karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NPWP yang dipandang rumit dalam pengurusannya, pengajuan harus melalui OSS yang dianggap cukup rumit dalam operasionalnya serta persyaratan lain yang wajib dipenuhi dan harus diurus pada instansi lain diluar BPPMHKP Mamuju seperti PKPRL untuk Lokasi budidaya rumput laut, sertifikat pelatihan CPIB diatas kapal dan lain sebagainya.

IK.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Analisis

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP serta SPDI yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

$$\%X = (A+B)/xn \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

2. Capaian

Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Stasiun KIPM Mamuju dari target 2 pada Tahun 2025, pada triwulan III ini telah Terealisasi dengan terbitnya sertifikat perpanjangan sertifikasi HACCP pada Unit Pengolahan Ikan CV.Sakura Prima dijadwalkan pada triwulan III tahun 2025. Selain itu, pada triwulan III 2025 juga telah dilakukan Inspeksi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak (UMKM/UPI) dengan 3 jenis produk terbit Sertifikat SKP.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Pada Tahun 2025, telah dilakukan surveilan sebanyak 2 kali dengan 4 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP.

Tabel 2.9. Target dan Realisasi IK.02.1 pada Tahun 2025

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Target/Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
70	70	100	100	70	70	100

2. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACC lingkup SKIPM Mamuju yaitu:

- Survailen HACCP dan Inspeksi Perpanjangan Sertifikat HACCP Unit Pengolahan Ikan.
- Sertifikasi SKP pada Unit Pengolah Ikan dan UMKM/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan Tahun 2025 untuk IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamuju ditargetkan sebanyak 2 rekomendasi/ruang lingkup dan berhasil merealisasikan target IK Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup SKIPM Mamdiju, yaitu 2 rekomendasi/ruang lingkup melalui inspeksi dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Selain itu, SKIPM Mamuju juga telah merealisasikan inspeksi dan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 2 (dua) UPI dengan jumlah Sertifikat sebanyak 3 Sertifikat SKP.

IK. 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

1. Analisis



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mengetahui akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan

Cara pengukuran

- A : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (0,35)
- B : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (0,35)
- C : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (0,30%)
- N : Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

QUOTE x 100%

2. Capaian

Kontribusi SKIPM Mamuju dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten



negara tersebut.

Pada triwulan III Tahun 2025, sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang memenuhi syarat yang diterbitkan melalui Stasiun KIPM Mamuju adalah Nihil sehingga capaian pada triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 99%. Dimana hal ini disebabkan tidak adanya kasus penolakan karena tidak adanya aktivitas dan permohonan penerbitan sertifikasi lalu lintas hasil perikanan ekspor yang melalui Stasiun KIPM Mamuju.

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan BPPMHKP, melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di Unit Pelaksana Teknis.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain: Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor yang dihitung melalui pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor pada Tahun 2025 Terealisasi 100% dari target 99%.

SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 6. SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW III	Realisasi TW III
------------------	----------------------------	---------------	------------------



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



		TAHUN 2025	2025
SK 2. Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	-	-
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	-	-
	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Indeks)	-	-
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	-	-
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	85	100
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	76	100
	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)	-	-
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (Nilai)	88	93.06

IK. 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Mamuju Terealisasi 100% dari target 85%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun KIPM Mamuju untuk TW III Tahun 2025 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



kinerja lingkup BPPMHKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 Januari 2025 s.d Maret 2025 atau Tahun 2023 s.d Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP . Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\Sigma Nt}{\Sigma N} \times 100$$

Keterangan:

ΣNt : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SKIPM Mamuju

ΣN : Jumlah rekomendasi dari Laporan Hasil Pengawasan yang diberikan kepada SKIPM Mamuju

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK 22 pada Tahun 2022

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra2020-2025		
2024	Target 2025	Realisasi	%Capaian	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
80	85	100	117	80	100	120

2. Analisis

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran

Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja

Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja

x 100%



3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Monitoring Tindak lanjut Temuan atas laporan keuangan yang telah dijadikan temuan BPK atau itjen

IK.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Mamuju

1. Analisis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuesioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



2. Capaian

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Stasiun KIPM Mamuju (Indeks) yang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) melalui website <http://ok.bppmhkp.kkp.go.id/skm/87> yang dilakukan setiap triwulan dan pada Tahun 2025 mendapat perolehan nilai 3.92 dengan target nilai 3.36.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Mamuju dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh Mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Mamuju.

Pada Tahun triwulan III 2025, Realisasi indikator ini 93.06 dari target 88 atau mencapai 105,75%, Realisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun KIPM Mamuju seperti disajikan dalam tabel 2 di bawah ini :

Nilai Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Mamuju						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Target 2023	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
	88	93.06	105.75		3.36	116.67

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

Mamuju (nilai)

2. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (%)
3. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Mamuju (parameter)
4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).

IK. 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)

1. Capaian

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP Lingkup Stasiun KIPM Mamuju pada Triwulan III tahun 2025 yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku memiliki target sebesar 76 dan Terealisasi sebesar 100 Persen Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat Kegiatan dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan prosedur dan aturan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2025

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025			Renstra 2020-2025		
Realisasi	Target 2025	Realisasi	%Capaian	Target 2024	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84.34	76	100	120	80	84.34	105.43

Pada tahun 2025 indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang atau jasa BPPMHKP memiliki target 85 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.



Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

3. Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator ini pada Triwulan III Tahun 2025, dapat diperoleh.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Mamuju TW III Tahun 2025 merupakan instrumen bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan Kegiatan dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2025.

Tingkat capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan dan laporan yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan secara internal.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, Stasiun KIPM Mamuju tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa masukan dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam



mendukung pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Rencana Kegiatan (*Strategic Plan*) di lingkungan Stasiun KIPM Mamuju dimasa mendatang.

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN :

Laporan Sertifikat Kelayakan Pengolahan BPPMHPK Tahun 2025

Periode: 01/01/2025 - 07/10/2025

REKAP SKP PER PROVINSI

No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah
1	DKI JAKARTA	138	11	SULAWESI TENGAH	103	21	ACEH	38	31	BENGKULU	9
2	JAWA TIMUR	663	12	MALUKU	62	22	KALIMANTAN TIMUR	25	32	SUMATERA BARAT	8
3	BANTEN	598	13	NUSA TENGGARA BARAT	56	23	KALIMANTAN TENGAH	23	33	SUMATERA SELATAN	7
4	JAWA BARAT	893	14	LAMPUNG	58	24	RIAU BARAT	23	34	RIAU	6
5	JAWA TENGAH	336	15	MALAKULUTRA	18	25	KALIMANTAN UTARA	22	35	RIAU TENGAH	5
6	SULAWESI SELATAN	231	16	KERULAWAN BANGKA BELITUNG	44	26	RIAU BARAT DAYA	21	36	DAERAH Istimewa	1
7	SUMATERA UTARA	283	17	KALIMANTAN SELATAN	44	27	DIYODHIGARA	17	37	RIAU SELATAN	1
8	BAJU	158	18	GORONTALO	41	28	NUSA TENGGARA TIMUR	17	38	RIAU PENGUNJAN	0
9	KERULAWAN RIAU	142	19	SULAWESI TENGGARA	40	29	JAWA	13			
10	SULAWESI UTARA	196	20	KALIMANTAN BARAT	27	30	RIAU	12			

Rincian Report SKP

No	Provinsi	Master SKP	Tanggal Terbit	Tanggal Perseorangan	Nama Pemohon	NIB	NIPW	Alamat Pemohon
1	SULAWESI TENGAH	0102320118000018001	2025-09-10	2025-02-02 07:21:14	DAHLIA	0102320118000	07168853201000	IL DEAH SAMPURA

Data SKP Terbit

No	Nama UPT	Produk ID	Produk DN	No. Seri	No. SKP	Tgl Terbit / Expired	Rank	Alamat	Provinsi	Status/ID/NO dan DSS	
1	POHLANDAN SIKAMASE	Nugget Ikan	Fish Nugget	41400	385070/SKPL/RI/05/2025	22-08-2025 / 22-08-2027	B	Desa Buntu Bada Kampung Bana, Kecamatan Marau, Kabupaten Marau, Kabupaten Marau, Kabupaten Marau, Kabupaten Marau	Sulawesi Barat	Ditawajui ID: 1-20250728104332012473 NO: 06122000101900000001	
2	MASSANANG JAJA	Kerupuk Ikan	Fish Cracker	40888	3882110/SKPL/NV/01/2025	10-08-2025 / 12-08-2027	B	J. A. Melayan III, Desa Melayan Bontom, Kecamatan Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom	Sulawesi Barat	Ditawajui ID: 1-202506170504135204304 NO: 13122300800400000004	
3	MASSANANGJAJA	Abon Ikan	Dried Fish	40588	3882070/SKPL/NV/01/2025	12-08-2025 / 12-08-2027	B	J. A. Melayan III, Desa Melayan Bontom, Kecamatan Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom, Kabupaten Bontom	Sulawesi Barat	Ditawajui ID: 1-202506200440245486718 NO: 13122300800400000001	

Realisasi Sertifikasi SKP Trwulan III tahun 2025



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Kegiatan Inspeksi SKP di UPI Masannang Jaya

HACCP Online System

Pengajuan Master Dokumentasi Rekapitulasi **Sertifikasi**

Notifikasi A.Arham Hasasmudin

- Alamat - Produk - Tgl Terbit JULI 2025 - (SEPTEMBER) 2025

Sulawesi Barat Stasiun KIPM Mamuju [Grade] [Produk] [Jenis Usaha] [Skala Usaha]

[Status Sertifikasi] [Lama Sertifikasi] [Status UPI] [Status Produk] [Jenis] [Negara Importir] [IMRA] [Urutan]

Kata Kunci "Sulawesi Barat" "Stasiun KIPM Mamuju", Jumlah : RUPI = 1 Unit #Sertifikat = 2 Dokumen

No	Nama (NAMA/PW/SLU)	Alerat/Idol/Idex Berkas/Kontak	Proses ABT	Tgl Tahap Impor	Tgl Tahap Pembelian	Produk (Status/Process)	Grade	No	No. Sertifikat	Tgl Terbit (Berlaku/Sampai)	Lama Terbit	Status Sertifikat
1	SAKURA PRIMA CV 022000001952 63.630.390.7- 413.000 Usaha Besar	DUN Neukabuka, Desa Lelabendo, Kecamatan Sindana, Kabupaten Majene, West Sulawesi - Indonesia 082192875603 A.	Sulawesi Barat (Stasiun KIPM Mamuju)	Terbitan 03 SEP 2025 Imporasi: 03 SEP 2025 (di TERPAT)	Bis Perbaikan 01 OCT 2025 Perbaikan: 22 SEP 2025	Dried Grill Flying Fish (Perapangan) Receiving, Processing, Drying, Packaging/Labeling, Storing, Stuffing	B	1	113PMHACCPB/0925	10 SEP 2025 (10 SEP 2027)	3 hari	BERLAKU
	No. Register : Jarak: ORPA DINIA ADMINISTRASI 082192875603 omhaop@gmail.com			Laporan IM 08 SEP 2025 Pengawasan Terbaru: 08 SEP 2025 Rekomendasi Terbaru: 10 SEP 2025		Frozen Patinng Fish (Perapangan) Receiving, Processing, Freezing, Packaging/Labeling, Cold Storing, Stuffing	B	3	113PMHACCPB/0925	10 SEP 2025 (10 SEP 2027)	3 hari	BERLAKU

Realisasi Inspeksi Penerapan HACCP Triwulan III 2025

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Kegiatan Inspeksi Perpanjangan Sertifikat HACCP CV. Sakura Prima



Pelaksanaan Surveilans Penerapan HACCP di CV. Sakura Prima

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Kegiatan Inspeksi CPIB Diatas Kapal Nirmala 2

ptsp.kkp.go.id/skm/p/laporan_rekap_upp_v/2025/3

Susan KKP

Stasiun KIPM Mamuju

Dashboard

Mapping Data

Laporan

Data Detail

Rekap per UPP per Unsur

Rekap SKM per Produk Layanan

Rekap SKM per UPP

Rekap SKM per Eselon

Upload Laporan Monev

Resume Laporan Monev

PAGES

Download

Profile

Logout

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Bengkulu	2025	3	4.85	92.49	27
bmutu	Stasiun KIPM Mamuju	2025	3	4.88	93.06	8
bmutu	Stasiun KIPM Cirebon	2025	3	4.98	94.93	91
bmutu	Balai Besar KIPM Jakarta I	2025	3	4.92	92.57	74
bmutu	Stasiun KIPM Palu	2025	3	5.00	99.69	45
bmutu	Stasiun KIPM Bima	2025	3	4.98	95.90	42
bmutu	Balai Uji Standar KIPM	2025	3	4.84	90.59	31
bmutu	Balai KIPM Denpasar	2025	3	4.92	90.33	108
bmutu	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	2025	3	4.94	97.06	34
bmutu	Stasiun KIPM Medan II	2025	3	4.91	95.86	47

Showing 11 to 20 of 152 entries

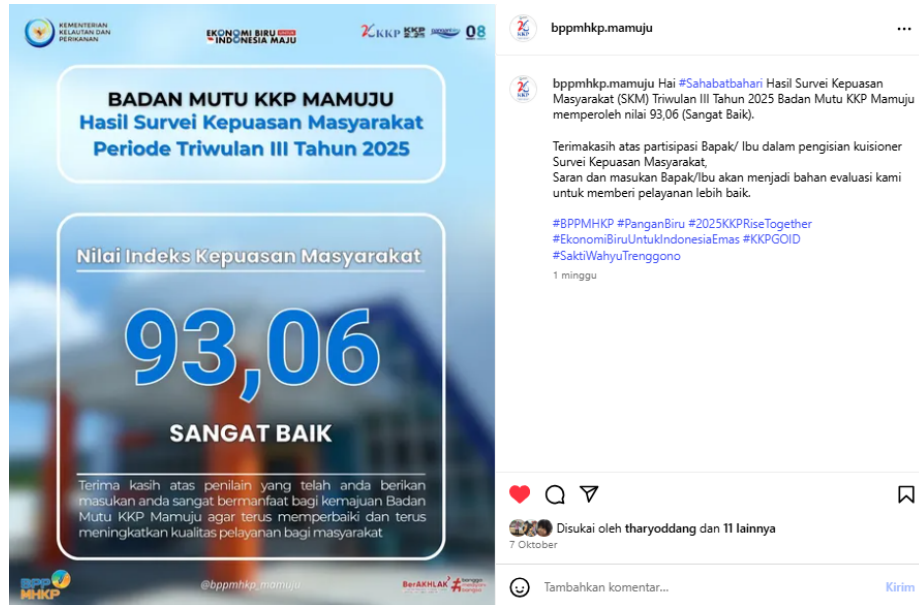
Download Data

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																			
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU																			
PERIODE TRIWULAN III 2025																			
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS	NRR PER JENIS		
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	wirusaha	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Masih banyak UMKM yg blm dapat informasi seperti ini	94,44	93,06	
2	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	46-60	S1	wirusaha	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Pelaku usaha masih banyak yg miskin informasi. sosialisasi lebih masif	83,33		
3	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	Perempuan	25-45	D3	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Snga kedepannya silu di pertahankan dan ditingkatkan	100,00	92,59	
4	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	Perempuan	25-45	S1	pelajar	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	sudah sangat baik	77,78		
5	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	S1	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Sudah sangat memuaskan	100,00	94,44	
6	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	PELAYANAN SANGAT BAIK	100,00		
7	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Perempuan	25-45	S1	pns	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	perlu ada sosialisasi lebih intens terkait penerbitan skp yang terintegrasi dengan oss	88,89	100,00	
8	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	Perempuan	25-45	D3	swasta	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Silu di tingkatkan	100,00		
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						31	28	31	29	30	31	29	29	30	SANGAT BAIK			95,02	
RATA-RATA PER-UNSUR						3,88	3,50	3,88	3,63	3,75	3,88	3,63	3,63	3,75					
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,43	0,39	0,43	0,40	0,42	0,43	0,40	0,40	0,42					
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						93,06													

Hasil Perhitungan Nilai Survei IKM Triwulan III tahun 2025

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II tahun 2025

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Sosial Media Kami
@bppmhkp_mamuju



Kontak Kami
(0426) 22434



BPP
MHKP
Bring Safety through Quality

Alamat Kami
**Jalan Martadinata Simpang
Empat Arteri Simboro
Mamuju**

